



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Oktober 2019

Kepada Yth,

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
4. Tim Penilai Internal Mahkamah Agung di -
tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK PERCEPATAN DAN MENCAPAI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2019**

Sehubungan dengan telah berakhirnya desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pengadilan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), serta rencana kunjungan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke beberapa pengadilan di seluruh Indonesia, maka dengan ini diberitahukan langkah-langkah strategis untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu demi kelancaran dan keberhasilan kunjungan dimaksud, yaitu:

1. Agar seluruh calon unit kerja berpredikat WBK mempersiapkan seluruh aparatur pengadilan, dokumen pendukung pembangunan ZI, fasilitas dan sarana gedung kantor sehingga kondisi yang ditampilkan sesuai dengan yang digambarkan Pimpinan pengadilan pada saat desk evaluasi, dan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing evaluator.

Pimpinan pengadilan pada saat desk evaluasi, dan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing evaluator.

2. Agar Pimpinan pengadilan mempersiapkan diri dengan berusaha memahami substansi dari pembangunan zona integritas secara lebih mendalam, memahami peran Pimpinan dan implementasi nyata dari pembangunan zona integritas serta capaian reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada unit kerja yang dipimpin.
3. Agar Pimpinan pengadilan mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai layanan peradilan yang dimiliki, sehingga saat berlangsung kunjungan dari Kementerian PANRB Bapak/Ibu mampu menjelaskan seluruh layanan pada pengadilan secara lugas, singkat dan komprehensif.
4. Agar mempersiapkan para petugas layanan peradilan baik dari segi sikap maupun wawasan sehingga mampu menjelaskan dan mempraktekkan layanan peradilan kepada evaluator Kementerian PANRB.
5. Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap integritas pengadilan, perlu dibuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan (Lampiran 1), serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparaturnya pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari (Lampiran 2).

Langkah-langkah strategis tersebut pada angka (1) sampai dengan (5) di atas wajib untuk dilaksanakan secepatnya, mengingat pemberitahuan kunjungan dari Kementerian PANRB akan dilakukan secara mendadak dan adanya kemungkinan kunjungan ke pengadilan di luar unit kerja yang telah dikonfirmasi.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung; dan
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung.